

**ANALISIS PERBANDINGAN KUALITAS KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH SE-KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



Nama : Ria Anggela

NIM : 222016106

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

**ANALISIS PERBANDINGAN KUALITAS KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH SE-KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

**Diajukan untuk Memperoleh Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Nama : Ria Anggela

NIM : 222016106

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ria Anggela
NIM : 222016106
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah dittulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2020



Ria Anggela

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perbandingan Kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Ria Anggela
NIM : 222016106
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, agustus 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0206046303/784021


Lis Djuniar, SE., M.Si
NIDN/NBM: 0220067101/1115716

Mengetahui,
Dekan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

**"Anda tidak harus hebat untuk memulai, tapi anda harus
memulai untuk menjadi orang hebat"**

(Ria Anggela)

**Dengan Izin-Mu dan dengan
Rahmat-Mu yaa Allah Skripsi ini Ku
persesembahkan kepada:**

- ❖ **Keduan orang tuaku Ayah Al
Sukri dan Ibu Lindaryati**
- ❖ **Saudara-saudaraku Rio
Anggara dan Reno Gusti Randa**
- ❖ **Pembimbing Akademik dan
Skripsiku**
- ❖ **Dosen-dosen Ump**
- ❖ **Sahabat-sahabatku, Abang
aku serta teman-teman
bimbanganku**
- ❖ **Almamaterku UMP**



PRAKATA

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat allah SWT yang maha pengasih maupun penyayang dan atas segala limpah rahmat karunia, serta hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini, yang berjudul **“Analisis Perbandingan Kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”**, telah selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana akuntansi pada program strata satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama pada orang tua yang do'a dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, SE. M.Si selaku Pembimbing 1 dan Ibu Lis Djuniar, S.E.,M.Si selaku Pembimbing 2 yang telah membimbing dan memberikan masukkan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Univeritas Muhammadiyah Palembang beserta staf.

2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri Sirajjudin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Muhammad Fahmi, S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Sahabat dan Teman-Teman serta seluruh angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membala budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

.

Palembang, Juli 2020

Ria Anggela

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GRAFIK	xii
HALAMAN DAFTAR LAMIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Kualitas Kinerja Keuangan	10
a. Pengertian Kualitas Kinerja Keuangan	10
b. Tahap-Tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan	11
2. Keuangan Daerah	12
a. Pengertian Keuangan Daerah	12
b. Ruang Lingkup Keuangan Daerah	13

c. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.....	14
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	15
4. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah	16
a. Pengertian Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah.....	16
b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan	17
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	24
6. Pelaporan Keuangan.....	25
a. Pengertian Pelaporan Keuangan	25
b. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	27
c. Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	27
d. Kepentingan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	28
7. Laporan Realisasi Anggaran	29
a. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran	29
b. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran	30
c. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran.....	30
d. Struktur Laporan Realisasi Anggaran	31
e. Isi Laporan Realisasi Anggaran	32
B. Penelitian Sebelumnya	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Operasionalisasi Variabel.....	38
D. Data yang Diperlukan	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data dan Teknis Analisis	40
1) Analisis Data	40
2) Teknik Analisis.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Gambaran Umum wilayah provinsi Sumatera Sumatera	44

2. Gambaran Umum Badan Pemeriksa Keuangan	49
3. Data Penelitian	51
B. Pembahasan Hasil Penelitian	53
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	72
A. Simpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel I.1	LRA Pendapatan Belanja Sumsel.....	5
Tabel II.1	Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah	20
Tabel II.2	Kriteria rasio keserasian.....	20
Tabel II.3	Kriteria proporsi pendapatan PAD.....	23
Tabel II.4	Kriteria proporsi pendapatan transfer.....	23
Tabel II.5	Kriteria proporsi lain-lain pendapatan sah.....	23
Tabel II.6	Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya.....	35
Tabel III.1	Operasional Variabel	38
Tabel IV.1	Data penelitian.....	51
Tabel IV.2	Perhitungan rasio kemandirian.....	54
Tabel IV.3	Rasio belanja operasi.....	57
Tabel IV.4	Rasio belanja modal.....	60
Tabel IV.5	Proporsi PAD.....	63
Tabel IV.6	Proporsi pendapatan transfer.....	64
Tabel IV.7	Proporsi lain-lain pendapatan sah.....	65
Tabel IV.8	Kualitas Kinerja keuangan yang baik.....	68

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik IV.1 Rasio kemandirian keuangan daerah.....	55
Grafik IV.2 Rasio Belanja Operasi.....	58
Grafik IV.3 Rasio belanja modal.....	61
Grafik IV.4 Rasio pendapatan PAD.....	64
Grafik IV.5 Rasio pendapatan transfer.....	65
Grafik IV.6 Rasio pendapatan lain-lain sah.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi.....	75
Lampiran 2 Sertifikat Teofl.....	76
Lampiran 3 Sertifikat Hapalan Surat-Surat Pendek Juz Amma.....	77
Lampiran 4 Sertifikat Pelatihan Komputer <i>Microsoft Word and Microsoft Excel</i>	78
Lampiran 5 Sertifikat <i>Generals Ledger Excel And Mind Your Own Business(MYOB) For Accounting</i>	79
Lampiran 6 Bebas Plagiat.....	80
Lampiran 7 Biodata Penulis.....	81

ABSTRAK

Ria Anggela/222016106/2020/Analisis Perbandingan Kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) perbandingan kualitas kinerja keuangan se-kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan jika di ukur dengan rasio kemandirian, rasio keserasian dan proporsi. 2) kabupaten/kota yang memiliki kualitas kinerja keuangan yang paling baik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian komparatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data laporan realisasi anggaran dan belanja tahun 2015-2018. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan melakukan perhitungan masing-masing rasio keuangan dan analisis kualitatif dengan menganalisis kenaikan atau penurunan rasio tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah se-kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan jika dilihat dari rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio proporsi pendapatan yang memiliki kinerja keuangan yang paling baik adalah Kota Palembang dengan indeks 60%.

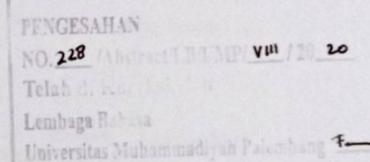
Kata kunci : kualitas kinerja keuangan daerah, Rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio keserasian, Rasio Proporsi.

ABSTRACT

Ria Anggela /222016106/2020 / Comparative Analysis of Financial Performance of Regional Governments of the Regencies / Cities of South Sumatra Province

This study aimed at determining 1) a comparison of the quality of financial performance in all districts / cities in the province of South Sumatra if measured by the ratio of independence, harmony ratio and proportion. 2) regencies / cities that have the best quality financial performance. This research was a type of comparative research. The data used were secondary data, namely the 2015-2018 budget and expenditure realization report data. The data analysis method used was quantitative analysis by calculating each financial ratio and qualitative analysis by analyzing the increase or decrease in the ratio. The results showed that the financial performance of the regions in the district / city in the province of South Sumatra when viewed from the ratio of independence, the ratio of harmony and the ratio of the proportion of income that had the best financial performance was Palembang City with an index of 60%.

Keywords: the quality of regional financial performance, the ratio of regional financial independence, the ratio of harmony, the ratio of proportion.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan kinerja untuk membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan pasal 293 dan pasal 330 Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan amanat untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengelola keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah selain diatur dengan peraturan pemerintah juga mengikuti peraturan menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang dikelola secara sistematis.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Bab 1 pasal 1, ayat 5 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang telah diperbaharui dalam peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Pelaksanaan Otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan. Keuangan daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut pendapatan asli daerah dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. (Nurkholis, 2019:24).

Pelaksanaan otonomi daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya di bidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna kelangsungan pembentukan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. (Anim, 2016).

Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, kinerjanya adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang

akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan akan dapat menghasilkan informasi yang sangat penting, terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, dan memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan adalah melakukan analisis rasio kemandirian, rasio proporsi dan rasio keserasian.

Berdasarkan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh beberapa ahli antara lain, dilakukan oleh Anim (2016) menyatakan hasil uji yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2013 masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi dari pada belanja modal.

Penelitian sebelumnya Maisyuri (2017) menyatakan hasil uji yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat independensi, kinerja keuangan daerah Lhokseumawe pemerintah Kota masih belum mandiri karena dari tingkat efektivitas, keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe masih kurang efektif dalam mengelola keuangan lokal. Tingkat efisiensi dalam manajemen

keuangan administrasi Kota juga belum efektif, laju pertumbuhan pendapatan Asli Daerah, pemerintah kota Yogyakarta Lhokseumawe masih belum meningkatkan pendapatannya.

Penelitian Marina dkk (2018) menyatakan bahwa hasil uji yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi masih sangat rendah, rasio ketergantungan keuangan daerah masih tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah rendah dengan pola konsultatif, rasio belanja operasi terhadap total belanja mendominasi alokasi belanja dibandingkan dengan rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio efisiensi belanja kurang efisien. Perlu dilakukan monitoring dan pengawasan agar pemerintah dapat mengurangi belanja tidak langsung, khususnya belanja pegawai, memaksimalkan alokasi belanja modal agar untuk infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta memperkecil kesenjangan antar daerah dan kelompok masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi di pulau Sumatera yang terdiri dari empat (4) Kota dan tiga belas (13) Kabupaten, menjalankan kinerjanya pemerintah membutuhkan sumber pendapatan yang nantinya digunakan untuk belanja. Gubernur Sumatera Selatan merupakan kepala pemerintahan dalam menjalankan kinerja di bidang pengelola keuangan dan aset daerah yang dibantu oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Sumatera Selatan. Kepala BPKAD ini bertugas dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pelaksanaan anggaran SKPD. (Welly dan Lis, 2017).

Berikut ini disajikan mengenai laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2015-2018:

Tabel I.1
Laporan Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab/kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Pendapatan	Realisasi	Belanja	Realisasi
			(Ribuan Rupiah)	(Ribuan Rupiah)	(Ribuan Rupiah)	(Ribuan Rupiah)
1.	Palembang	2015	2.870.202.481	2.871.899.610	3.146.444.216	2.868.750.360
		2016	3.466.134.113	3.122.903.127	3.369.864.428	2.915.966.125
		2017	3.578.989.385	3.417.593.733	3.383.208.534	3.141.848.658
		2018	3.643.288.212	3.485.882.634	3.651.197.394	3.488.244.426
2	Muba	2015	2.506.193.141	2.034.401.344	2.364.027.425	1.899.319.701
		2016	2.849.225.683	2.640.255.197	2.516.296.929	2.516.296.929
		2017	2.876.720.007	2.642.776.006	2.566.618.015	2.340.644.994
		2018	2.703.265.186	3.019.699.825	3.203.365.186	2.958.060.291
3	Banyuasin	2015	1.833.573.044	1.540.083.544	1.755.075.142	1.540.083.544
		2016	2.180.253.159	1.951.227.051	1.909.404.888	1.602.242.344
		2017	2.014.566.266	2.006.422.252	2.566.618.015	2.340.644.994
		2018	1.948.005.479	2.080.649.009	2.035.556.230	1.992.040.769
4	Oki	2015	1.736.688.910	1.653.377.720	1.882.004.203	1.745.362.121
		2016	1.964.045.648	1.979.249.631	2.405.340.475	1.979.334.457
		2017	1.649.133.466	1.363.217.799	1.408.398.367	1.115.443.315
		2018	2.231.343.639	2.224.001.831	2.241.275.403	1.918.481.263
5	Ogan Ilir	2015	1.399.760.930	1.073.724.537	1.399.760.930	964.153.853
		2016	1.542.879.089	1.542.879.089	1.453.289.005	1.102.973.684
		2017	1.649.133.466	1.215.443.315	1.408.398.367	1.363.217.799
		2018	1.549.469.950	1.417.185.838	1.547.169.950	1.274.234.887
6	OKU	2015	1.109.603.969	1.034.793.698	1.220.349.843	1.085.467.499
		2016	1.241.663.992	1.192.981.912	1.192.981.912	993.279.511
		2017	1.416.035.133	1.396.244.570	1.297.686.974	1.186.374.978
		2018	1.311.311.318	1.412.521.909	1.463.688.662	1.419.173.692
7	OKU Selatan	2015	933.698.026	933.056.431	1.038.873.351	925.258.905
		2016	1.236.605.536	1.236.605.536	1.122.067.311	1.014.409.319
		2017	1.258.607.949	1.222.264.959	1.082.192.218	989.011.519
		2018	1.227.209.054	1.268.126.824	1.303.537.687	1.228.203.115
8	OKU Timur	2015	1.344.367.675	1.298.375.034	1.261.897.416	1.158.799.615
		2016	1.669.766.891	1.521.770.289	1.428.590.115	1.285.585.518
		2017	1.671.268.817	1.599.418.326	1.356.701.260	1.289.877.393
		2018	1.649.349.343	1.627.163.554	1.652.814.789	1.614.913.933
9	Muara Enim	2015	2.283.476.954	1.977.122.379	2.453.375.336	2.112.376.745
		2016	2.177.891.479	2.049.002.254	2.180.613.601	1.856.355.068
		2017	2.416.523.878	2.402.350.260	2.033.737.393	1.897.083.715
		2018	2.064.926.236	2.525.583.634	2.417.264.086	2.434.360.114
10	Prabumulih	2015	895.489.650	816.654.321	1.011.173.914	922.580.955
		2016	1.072.008.198	940.737.360	1.018.217.047	891.296.683
		2017	930.320.518	930.320.518	956.939.607	956.939.607
		2018	874.733.232	958.368.934	872.733.232	850.890.467
11	Lahat	2015	1.657.846.559	1.559.989.661	1.657.846.559	1.559.989.661
		2016	1.868.537.150	1.726.004.654	1.747.349.170	1.545.145.014
		2017	1.957.810.446	1.765.015.019	1.715.307.187	1.408.832.916

		2018	1.740.437.900	1.916.874.000	1.838.590.794	1.834.483.998
12	Pagar Alam	2015	816.005.973	747.658.414	904.406.482	795.537.900
		2016	874.003.600	814.062.290	945.858.698	797.621.810
		2017	888.544.891	812.270.609	893.475.825	743.610.049
		2018	817.250.572	769.448.437	826.658.246	655.603.214
13	Musi Rawas	2015	1.504.015.512	1.616.908.301	1.592.855.152	1.405.099.541
		2016	1.763.644.399	1.617.409.674	1.713.677.287	1.531.168.541
		2017	1.625.481.874	1.549.566.489	1.313.648.923	1.192.026.376
		2018	1.697.033.491	1.759.880.995	1.681.581.278	1.648.414.553
14	Lubuk Linggau	2015	861.092.232	821.900.180	896.317.650	821.639.554
		2016	975.225.201	883.629.694	896.856.354	809.943.066
		2017	1.002.530.943	906.258.990	967.151.199	870.709.076
		2018	952.999.507	923.898.833	868.799.507	859.995.202
15	Empat Lawang	2015	728.699.641	757.424.055	728.699.641	728.699.641
		2016	895.125.276	801.728.601	750.557.059	648.861.582
		2017	963.691.978	904.327.377	792.729.567	722.850.409
		2018	951.766.581	978.617.329	951.766.581	968.083.615
16	Mutara	2015	678.008.927	616.908.301	744.142.494	670.724.435
		2016	797.621.810	813.614.247	789.741.912	720.301.758
		2017	812.629.762	785.394.510	755.212.199	677.194.130
		2018	945.842.746	922.981.792	963.759.600	867.583.014
17	Pali	2015	717.518.854	605.979.409	733.798.654	622.474.176
		2016	893.929.818	806.302.689	821.589.125	743.680.887
		2017	1.022.757.87	992.302.734	928.100.489	865.926.979
		2018	1.356.800.901	1.226.434.373	1.580.900.901	1.359.663.867

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2020

Berdasarkan Tabel I.1 diketahui bahwa setiap tahunnya pada perhitungan realisasi pendapatan dan belanja di setiap Kabupaten/Kota mengalami penurunan dan kenaikan. Pada Kota Palembang, Kabupaten Pali dan Kabupaten Muratara mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun pada Kabupaten Muba, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Empat Lawang tahun 2018 mengalami penurunan. Kabupaten Banyu Asin dan Kota Prabumulih tahun 2016 mengalami kenaikan tetapi tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan. Kabupaten OKI dan Kabupaten Musirawas tahun 2016 mengalami kenaikan namun tahun 2017 menurun dan tahun 2018 mengalami kenaikan lagi

sedangkan Kabupaten Muara Enim tahun 2016 terjadi penurunan pada tahun 2017 kembali menaik dan pada tahun 2018 terjadi penurunan lagi. Dilihat dari pendapatan dan belanja setiap tahunnya. Dan dilihat dari anggaran rasio kemandirian, keserasian dan proporsi yang terealisasinya masih banyak yang belum stabil.

Menurut Welly dan Lis (2017) Laporan Realisasi Anggaran dikatakan Surplus/Defisit apabila Pendapatan lebih besar dibandingkan Belanja. Diketahui bahwa Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan bahkan semakin meningkat setiap tahunnya. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. (Halkadri, 2019:13)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan kualitas kinerja keuangan se-kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan jika di ukur dengan rasio kemandirian, rasio proporsi, dan rasio keserasian?
2. Kabupaten/kota manakah yang memiliki kualitas kinerja keuangan yang paling baik?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Perbandingan Kualitas Kinerja keuangan se-kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan jika di ukur dengan rasio kemandirian, rasio proporsi, dan rasio keserasian.
2. Kabupaten/kota yang memiliki kualitas kinerja keuangan yang paling baik.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka peneliti ini diharapkan akan memberikan pendapat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis
Sebagai bukti empiris yang ada tentang Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Se-kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai sumbang saran, bahan referensi dan informasi pendukung untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Agustina Oesi, (2013). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011*). Jurnal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Alfred Labi. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013-2015*, from Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga: Salemba Empat. Jakarta.
- Amrie Firmansyah dan Marmah Hadi. (2017). *Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Anim Rahmayati. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2013*. Jurnal EKA CIDA. Vol. 1 No.1
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan *Retrieved januari 29, 2020, from* https://palembang.bpk.go.id/?page_id=19317
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar. (2017). Kinerja Keuangan Daerah. *Retrieved November 23, 2019, from* <http://bpkad.Banjarkab.go.id/index.php/2017/09/07/kinerja-keuangan-daerah/>
- Devani Vera, (2016). *Pengukuran Kinerja Perpustakaan Dengan Pendekatan Balanced Scorecard*. JITI, Vol 15 (1): 26-35
- Halkadri Fitra. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Penerbit. CV IRDH
- Irham Fahmi. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Maisyuri. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe*. Jurnal Visioner dan Strategis. Vol. 6. No.1

- Marina F. Panjaitan, Parengkuan Tommy dan Victoria N. untu. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016*. JURNAL EMBA. Vol.6. No.3: 1398-1407.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati. (2015). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu*. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. Vol.4 No.1: 55-66.
- Nurkholis Moh. Khusaini. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Tim UB Press.
- Permandagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian bantuan social yang bersumber dari anggaran dan belanja daerah.
- Permandagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 yang telah berubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP).
- Rigel Nurul Fathah. (2017). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*.
- Runik Puji Rahayu. (2016). *Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol.1 No.1
- Uma Sekaran dan Roger. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 6. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Welly dan Lis Djuniar. (2017). *Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009-2015*. *Jurnal Ekonomi*. Vol.22. No.1:1-21
- V. Wiratna Sujarweni. (2019). *Metodologi Penelitian:Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.